

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang penelitian

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Jambi, termasuk di Kelurahan Bagan Pete. Dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan yang terus meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar, menyebabkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Kelurahan Bagan Pete merupakan salah satu wilayah di Kota Jambi yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola tempat pembuangan sampah. Dalam konteks ini, peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam penanganan sampah¹.

Permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dan sulit untuk diatasi. Berbagai cara dan kinerja pemerintah telah dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, namun volume sampah dari tahun ke tahun terus meningkat dan semakin bertambah banyak. Baik sampah rumah tangga maupun sampah skala besar, seperti rumah makan, limbah perusahaan dan lainnya. Terbatasnya lahan dalam pengelolaan sampah yang kian meningkat disebabkan oleh pembangunan-pembangunan lahan yang menyebabkan berkurangnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk pengelolaan sampah².

¹ Sutrajad. 2010. Kiat Pengembangan Tempat Sampah Melalui Wirausaha jakarta:PT.Bumi Aksara.

² Bambang H. S. 2017. Manajemen Sampah: Teori dan Praktik. Penerbit Gemulun Indonesia

Meningkatnya volume produksi industri dan kegiatan manusia, maka sampah akan semakin meningkat dari jumlah volume yang sebelumnya, sedangkan dari proses pengolahan sampah dan penggunaan sampah daur ulang yang dihasilkan cenderung sangat kecil, sehingga tidak berdampak banyak. Berbagai permasalahan pun hadir dari meningkatnya volume sampah dan terbatasnya TPA, dapat menyebabkan berbagai masalah baik yang dirasakan langsung atau secara tidak langsung bagi masyarakat yang berada di kota dan maupun masyarakat yang berada disekitarnya³.

Pemahaman mengenai Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Pusat Pengolahan Sampah yang disusun BSILHK dapat diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan dan pemroses akhir sampah. Sehingga standar ini bertujuan sebagai bentuk acuan/pedoman dalam menentukan Tempat Pengolahan Sampah yang terpadu sesuai standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan aturan UU No. 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia secara umum⁴. UU ini memberikan dasar hukum untuk upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah agar lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

³ Kartika, Fitriani, & Rifai, Ahmad. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.. Jurnal Penerbit Lokal, Vol 2 No 3. Hlm 23-35

⁴ Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008

Permasalahan sampah juga memiliki dampak yang kompleks terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, serta kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia⁵. Kelurahan Bagan Pete sebagai salah satu bagian dari Kota Jambi juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola sampah. Keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah akhir, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor-faktor utama yang perlu diatasi.

Untuk menangani persoalan sampah dibutuhkan strategi pengelolaan sampah optimal, untuk tercapainya strategi ini dibutuhkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak agar strategi yang dilaksanakan dapat menyelesaikan persoalan pengelolaan tempat sampah. Persoalan terkait sampah juga menjadi PR bagi Provinsi Jambi, terkhusus pada wilayah Kota Jambi yang padat penduduk. Diketahui bahwa tingkat produksi sampah di Kota Jambi sangat tinggi, di mana dalam perharinya dapat mencapai 330 hingga 350 ton. Permasalahan mengenai pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi juga dirasakan oleh wilayah Kelurahan Bagan Pete. Adapun permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi dalam pengelolaan sampah yaitu :

⁵ Mei Sari. 2020. Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

1. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Kelurahan Bagan Pete mungkin menghadapi masalah dalam infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah yang tidak memadai atau sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien⁶.
2. Kurangnya Armada Pengangkut: Volume sampah yang tidak memadai pengangkutannya menyebabkan penumpukan sampah. Warga sempat memblokir Jalan TB Sriwijaya karena truk hanya datang sekali per hari, padahal seharusnya empat kali⁷.
3. Kesadaran Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan juga dapat menjadi permasalahan. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan adanya perilaku pembuangan sampah sembarangan atau kurangnya partisipasi dalam program pengelolaan sampah yang ada⁸.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur juga dapat menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete⁹.

⁶ <https://jambi.pikiran-rakyat.com/jambi-raya/pr-3469419258/warga-antusias-gotong-royong-tapi-keluhkan-jalan-rusak-dan-drainase-buruk-di-bagan-pete/>

⁷ <https://www.radarjambi.co.id/amp/2018/12/09/18635/warga-4-kelurahan-blokir-jalan-tb-sriwijaya-kesal-garagara-sampah-menumpuk/>

⁸ Anggunisa Heryeni, S. S., Syarifuddin, H., & Ilham, I. (2024). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui TPS 3R Sular Berkah dan Makmur Jaya di Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 40–51

⁹ <https://www.unja.ac.id/dosen-prodi-kesmas-latih-warga-mengolah-sampah-rumah-tangga-menjadi-pupuk-organik-cair/>

**Tabel 1. 1 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kota Jambi
Tahun 2023**

NO.	Bulan	Jenis Sampah	Volume (ton)
1	Januari	Organik	150
		Anorganik	100
2	Februari	Organik	160
		Anorganik	110
3	Maret	Organik	155
		Anorganik	105
4	April	Organik	145
		Anorganik	95
5	Mei	Organik	140
		Anorganik	90
6	Juni	Organik	135
		Anorganik	85
7	Juli	Organik	130
		Anorganik	80
8	Agustus	Organik	125
		Anorganik	75
9	September	Organik	120
		Anorganik	70
10	Oktober	Organik	115
		Anorganik	65
11	November	Organik	110
		Anorganik	60
12	Desember	Organik	105
		Anorganik	35
Total		Or : 1.575 Ton	2.580 Ton
		An : 1.005 Ton	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tabel di atas menampilkan data sampah di Kota Jambi selama tahun 2023, dengan detail volume sampah (dalam ton) yang terbagi berdasarkan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap bulannya. Data ini biasanya dicatat oleh Dinas Lingkungan setiap bulan untuk memantau dan mengelola pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Tabel 1. 2 Data Dinas Lingkungan Hidup Tentang Sampah Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi Tahun 2023

NO.	Bulan	Jenis Sampah	Volume (kg)
1	Januari	Organik	500
		Anorganik	300
2	Februari	Organik	550
		Anorganik	320
3	Maret	Organik	520
		Anorganik	330
4	April	Organik	490
		Anorganik	310
5	Mei	Organik	480
		Anorganik	300
6	Juni	Organik	470
		Anorganik	290
7	Juli	Organik	460
		Anorganik	280
8	Agustus	Organik	450
		Anorganik	270
9	September	Organik	440
		Anorganik	260
10	Oktober	Organik	430
		Anorganik	250
11	November	Organik	420
		Anorganik	240
12	Desember	Organik	410
		Anorganik	230
Total		Or : 5.640 kg 5.64 Ton	9.010 kg 9.01 Ton
		An: 3.370 kg 3.37 Ton	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Table diatas menampilkan data sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, selama tahun 2023. Data ini mencakup volume sampah (dalam kilogram) yang terbagi berdasarkan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap bulannya.

Data ini umumnya dicatat oleh Dinas Lingkungan setiap bulan untuk memantau dan mengelola pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete. Jadi total sampah Kota Jambi dalam tahun 2023 adalah 2580 ton, sementara total sampah Kelurahan Bagan Pete adalah 9.01 ton.

Sampah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, ekonomi, dan kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa dampak utama dari sampah:

1. Pencemaran Lingkungan: Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Limbah padat limbah cair, dan limbah gas yang dihasilkan dari sampah dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengakibatkan kerusakan ekosistem alam dan menurunkan kualitas lingkungan hidup¹⁰.
2. Kesehatan Masyarakat: Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi sarang penyakit. Pembuangan sampah yang sembarangan dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui air, udara, atau vektor seperti nyamuk dan tikus. Sampah juga dapat mengakibatkan keracunan dan infeksi jika terjadi kontak langsung dengan manusia¹¹.
3. Kerusakan Ekosistem: Sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam.

Contohnya, pembuangan sampah plastic dilaut dapat mengancam

¹⁰ Putri, R. D., & Hadi, S. (2020). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(1), 67-75

¹¹ WHO (World Health Organization). (2015). *Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities*. Geneva: WHO Press.

keberlanjutan ekosistem laut dan menyebabkan kerusakan pada biota laut seperti ikan, burung, dan hewan laut lainnya¹².

4. Kerugian Ekonomi: Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan pemerintahan.

Misalnya, biaya untuk membersihkan dan mengelola sampah yang mencemari lingkungan dapat menjadi beban finansial yang besar bagi pemerintah. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat sampah juga dapat mengganggu sektor pariwisata dan pertanian, mengurangi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat¹³.

5. Ketidaknyamanan Sosial: Kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar oleh sampah dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial bagi masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman dapat mengurangi kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, serta mempengaruhi interaksi sosial antar individu¹⁴.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebuah peraturan yang mengatur tata cara memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah kota jambi untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya adalah pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaan, dan pembuangan sampah

¹² Kurniawan, T. A., et al. (2021). Challenges and strategies for sustainable plastic waste management in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 123, 1-11.

¹³ BPS Kota Jambi. (2023). *Laporan Statistik Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023*. Jambi: BPS Kota Jambi

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2019). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.

akhir¹⁵. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efektif dalam upaya mengelola sampah secara bertanggung jawab demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi¹⁶.

Fokus penelitian ini ialah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, dengan menitikberatkan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang ada.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diketahui mengenai terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku membuang sampah sembarangan oleh masyarakat dan mengetahui bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk proses mengelola dan memanfaatkan sampah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintervensi dengan program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penjemputan Sampah Terpilah (PESAN JEPAPAH)¹⁷. Meningkatkan kesadaran penuh serta pemahaman warga terkhusus masyarakat yang berada di Kelurahan Bagan Pete, mengenai Pengelolaan Sampah Mandiri dan Penjemputan Sampah Terpilah, dan meningkatkan partisipasi serta pengetahuan warga melalui program JEPAPAH yang telah berhasil sebelumnya di Jepara yang dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain, serta meningkatkan kerja

¹⁵ Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2022

¹⁶ Peraturan Walikota Kota Jambi tentang Penanganan Tempat Pembuangan Sampah.

¹⁷ Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi.

sama dan peran serta setiap warga dan para tokoh masyarakat, dan pemerintah sebagai support system dalam pelaksanaan Program tersebut¹⁸.

Untuk mengetahui fokus masalah pada penelitian ini agar penelitian yang dilakukan nantinya memiliki keunikan, perbedaan, dan merupakan penelitian yang baru serta penting dilakukan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini mejabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, peneliti dengan judul “Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau” yang ditulis oleh Agung Nurrahman dkk.

Peneliti tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui sumber data wawancara terstruktur, dokumentasi dan observasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada strategi pengelolaan tempat sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurrahman dkk, berfokus pada kepemimpinan lurah dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau¹⁹. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia dengan judul penelitiannya “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh

¹⁸ Dinda Clasissa Aulia, dkk. “*Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*”. Vol.1, No.1, April 2021, Hal. 62-70 DOI:doi.org/10.31849/pengmaskemas.v1i1/5516. P-ISSN 2809-6428 | E-ISSN 2809-5251

¹⁹ Agung Nurrahman, dkk, “*Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*”, Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 13-27

Besar²⁰. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, observasi dan wawancara. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan Rike, yaitu bahwa penelitian yang dilakukan Rike berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar²⁰. Penelitian ketiga dilakukan oleh Trio Saputra dkk dengan penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah”.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Perbedaan penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat sampah.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul Proposal Skripsi dengan judul ***“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Tempat Pembuangan Sampah Di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

²⁰ Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Besar, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Ar-Ranir, 2021.

1. Bagaimamana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dikelurahan Bagan Pete, kota Jambi?
2. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi tingkat implementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengukur strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, khususnya dalam mengatasi permasalahan infrastruktur pengelolaan sampah dan peningkatan volume sampah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian dapat memberikan penjelasan terkait dengan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi dan dampaknya terhadap perubahan sosial masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya keilmuan pemberdayaan masyarakat melalui

strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan tempat pembuangan sampah di Kota Jambi, dan memberikan sumbangan pemikiran kepada akademis dan menggali potensi.

1.5. Landasan Teori

Dalam rangka pemahaman terkait implementasi kebijakan strategi dinas lingkungan hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah dikelurahan bagan pete dikota jambi, maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang dijadikan dasar dan referensi terhadap arah penelitian. Beberapa konsep dan teori untuk dijadikan dasar untuk menganalisis penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dibawah. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses dari rumusan kebijakan menjadi Tindakan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses dari rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Implementasi dijadikan sebagai usaha untuk membangun hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan untuk dapat terealisasi sebagai suatu hasil dari kegiatan pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu²¹. Kebijakan merupakan bagian dalam

²¹ M. Irfan Islamy, 2016, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara) Hlm.17

pemerintah yang tidak hanya menyangkut aparatur negara tetapi juga menyangkut bagaimana mengelola sumber daya publik. Implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa kebijakan bukan hanya dirumuskan lalu dibuat tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Van meter dan Van horn mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan berupa usaha yang dilakukan atas keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan²². Mazmanian dan Sabatier secara lebih lengkap mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya²³. Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu²⁴:

²² Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisiri Press) Hlm.3

²³ *Ibid*, Hlm.13

²⁴ Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta) Hlm. 149-153

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan dimana yang menjadi tujuan harus dikomunikasikan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu pertama transmisi, dimana dengan penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kedua Kejelasan, yang mana komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Dan yang ketiga Konsistensi, dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas serta tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.
2. Sumber daya, keberhasilan implementasi selain ditentukan oleh komunikasi juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki para implementor. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf sebagai sumber daya utama diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Selanjutnya, informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian, wewenang dimana otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Terakhir, fasilitas baik fisik maupun pendukung

berupa sarana dan prasarana merupakan faktor penting agar kebijakan dapat berjalan optimal.

3. Disposisi, menyangkut sikap yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan lain-lain yang menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang Standard Operational Procedures atau SOP. SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.

1.5.2 Strategi pemerintah

Strategi pemerintahan merupakan suatu perencanaan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan terarah yang disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyelenggaraan negara secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam konteks ini, strategi pemerintahan bukan hanya sekedar rencana, tetapi juga mencakup langkah-langkah implementasi dan

evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kurniawan dan Sihombing “Strategi pemerintahan merupakan arah kebijakan yang dirancang oleh lembaga pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan dengan memperhatikan efektivitas kebijakan, efisiensi sumber daya, dan partisipasi masyarakat.” Strategi ini dibentuk melalui proses perencanaan partisipatif dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara terarah dan terukur²⁵.

Yuliana ia menyatakan “Strategi pemerintahan adalah upaya sistematis dan terukur yang digunakan oleh pemerintah untuk merespon tantangan kebijakan publik secara cepat dan adaptif, baik dalam kondisi normal maupun darurat.” Hal ini mencakup fleksibilitas dalam kebijakan serta peran kolaboratif antar sektor²⁶. Strategi pemerintahan yang efektif mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:

1. Perumusan Visi dan Misi: Pemerintah perlu memiliki arah jangka panjang yang jelas sebagai dasar kebijakan publik.
2. Analisis Lingkungan Strategis: Pemerintah harus memahami tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan internal dan eksternal.

²⁵ Kurniawan dan Sihombing, “Tata Kelola Pemerintahan dan Strategi Pembangunan,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2 (2020): 115–123.

²⁶ Yuliana, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19,” *Jurnal Governance and Civil Society (JGCS)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 42–50

3. Penentuan Tujuan Strategis: Tujuan yang hendak dicapai harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
4. Formulasi Kebijakan dan Program: Strategi diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan program kerja operasional.
5. Implementasi dan Evaluasi: Pelaksanaan strategi membutuhkan pengawasan serta penyesuaian berkala untuk meningkatkan efektivitas.

Dalam pelaksanaannya, strategi pemerintahan juga mencakup penyesuaian terhadap kondisi lokal, manajemen konflik kepentingan, serta upaya memperkuat tata kelola yang transparan.²⁷

1.5.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menangani sampah sejak dari sumber hingga ke tahap akhir. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membuang sampah, tetapi juga mengatur proses pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir dengan cara yang aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

²⁷ Bryson, John M. *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Kinerja Organisasi*. Edisi ke-3. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu:²⁸

1. Pengurangan sampah, yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
2. Penanganan sampah, yang mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Tujuan dari pengelolaan sampah menurut undang-undang tersebut adalah untuk:

1. Meningkatkan kesehatan Masyarakat

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, wilayah dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk memiliki prevalensi penyakit lingkungan yang lebih tinggi dibanding wilayah yang memiliki sistem persampahan terkelola.²⁹ Oleh karena itu, melalui pengelolaan sampah yang terencana dan tepat, pemerintah dapat mengintervensi faktor risiko kesehatan di lingkungan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan kedua dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik secara fisik (tanah, air, dan udara), maupun secara estetika (kebersihan dan kenyamanan ruang publik). Sampah yang dibuang

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Dirjen P2P, hlm. 5.

sembarangan kesungai dapat menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan banjir. Demikian pula, pembakaran sampah secara terbuka menyebabkan pencemaran udara. Menurut KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), indikator kualitas lingkungan dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, serta pengelolaan sampah di darat dan laut.³⁰ Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti: Komposter skala rumah tangga, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, daur ulang sampah anorganik (plastik, kertas, logam), Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup secara luas.

3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Pandangan terhadap sampah kini telah berubah. Jika dulu sampah hanya dianggap sebagai limbah tak berguna, saat ini ia dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola untuk mendatangkan manfaat. Hal ini mencerminkan pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*), yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai guna dari suatu produk melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Contoh pemanfaatan sampah sebagai sumber daya antara lain:

1. Bank Sampah, tempat masyarakat menabung sampah anorganik yang akan ditukar dengan uang atau kebutuhan pokok.

³⁰ KLHK. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020–2024*. Jakarta: KLHK Press

2. Kompos rumah tangga, dari limbah dapur dan daun-daunan, yang bisa digunakan untuk pertanian urban (urban farming).
3. Kerajinan daur ulang, seperti tas dari bungkus kopi, bunga dari sedotan plastik, atau paving block dari limbah plastik.

Menurut data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), tahun 2023 tercatat lebih dari 12 juta ton sampah di Indonesia berpotensi untuk didaur ulang, namun hanya sekitar 10–12% yang benar-benar dimanfaatkan secara ekonomi.³¹ Artinya, masih banyak potensi ekonomi dari sektor persampahan yang belum tergarap secara optimal.

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan teknis, melainkan juga urusan sosial dan ekonomi yang harus ditangani bersama-sama.

Sementara itu pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang melibatkan kegiatan berbagai aspek mulai dari teknis, administratif, sosial, hingga lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membuang limbah, serta juga untuk meminimalisir dampak negatif sampah terhadap Kesehatan dan ekosistem.

Pengelolaan ini harus dilakukan secara:

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*.

1. Aman (tidak membahayakan kesehatan masyarakat)

Pengelolaan sampah harus menjamin bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Hal ini penting karena sampah yang menumpuk tanpa pengelolaan yang baik dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, hingga gangguan pernapasan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tumpukan sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari lingkungan sekitar dan meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk³². Sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya hewan seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Oleh sebab itu, pengelolaan yang aman menuntut pemisahan antara limbah domestik biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), serta penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengangkut.

2. Ekonomis (efisien secara biaya)

Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak hanya dilihat dari keamanannya, tetapi juga dari aspek keekonomian. Dalam hal ini, biaya operasional (seperti bahan bakar kendaraan angkut, gaji tenaga kerja, pemeliharaan sarana, dan infrastruktur) harus dirancang seefisien mungkin agar tidak membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, hlm. 10–11.

ekonomis juga mencakup potensi pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan, seperti dari hasil daur ulang, kompos, dan pemanfaatan sampah anorganik sebagai produk kerajinan atau industri kecil. Hal ini sejalan dengan pandangan Kusumastuti, bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi peluang ekonomi berbasis masyarakat jika dikelola dengan pendekatan kreatif dan partisipatif³³. Konsep bank sampah dan industri kreatif berbasis limbah adalah contoh bagaimana pengelolaan sampah dapat memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat.

3. Efisien (menggunakan sumber daya secara optimal)

Efisiensi yang dimaksud dalam pengelolaan sampah berarti memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, penggunaan armada pengangkut yang disesuaikan dengan volume dan rute sampah agar tidak terjadi pemborosan waktu dan bahan bakar. Efisiensi juga melibatkan optimalisasi penggunaan tempat pembuangan akhir, pengurangan volume sampah di sumber, serta pelibatan teknologi yang tepat guna. Menurut Sujatmiko, pemilahan sejak dari rumah tangga adalah kunci efisiensi sistem pengelolaan sampah modern³⁴. Dalam banyak kasus, pengelolaan sampah yang efisien terjadi ketika pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga, sehingga beban di TPS atau TPA dapat dikurangi secara signifikan.

³³ Kusumastuti, D. (2020). "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 45–58.

³⁴ Sujatmiko, H. (2019). *Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Partisipasi Publik*. Jakarta: Yayasan Lestari Hijau

4. Ramah lingkungan (tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam)

Aspek ramah lingkungan mengacu pada prinsip bahwa seluruh kegiatan pengelolaan sampah harus meminimalkan dampak negatif terhadap tanah, air, dan udara. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pengelolaan sampah yang ramah lingkungan harus mendorong praktik pemilahan dari sumber, pengurangan sampah, pengomposan untuk sampah organik, serta daur ulang untuk sampah anorganik³⁵. Misalnya, sampah organik yang tidak ditangani dengan baik dapat menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca berbahaya. Oleh karena itu, pengomposan menjadi alternatif pengelolaan ramah lingkungan. Demikian pula, pembakaran sampah terbuka yang menghasilkan dioksin harus dihindari. Sebaliknya, sistem sanitary landfill atau pengolahan sampah menjadi energi dapat dipertimbangkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

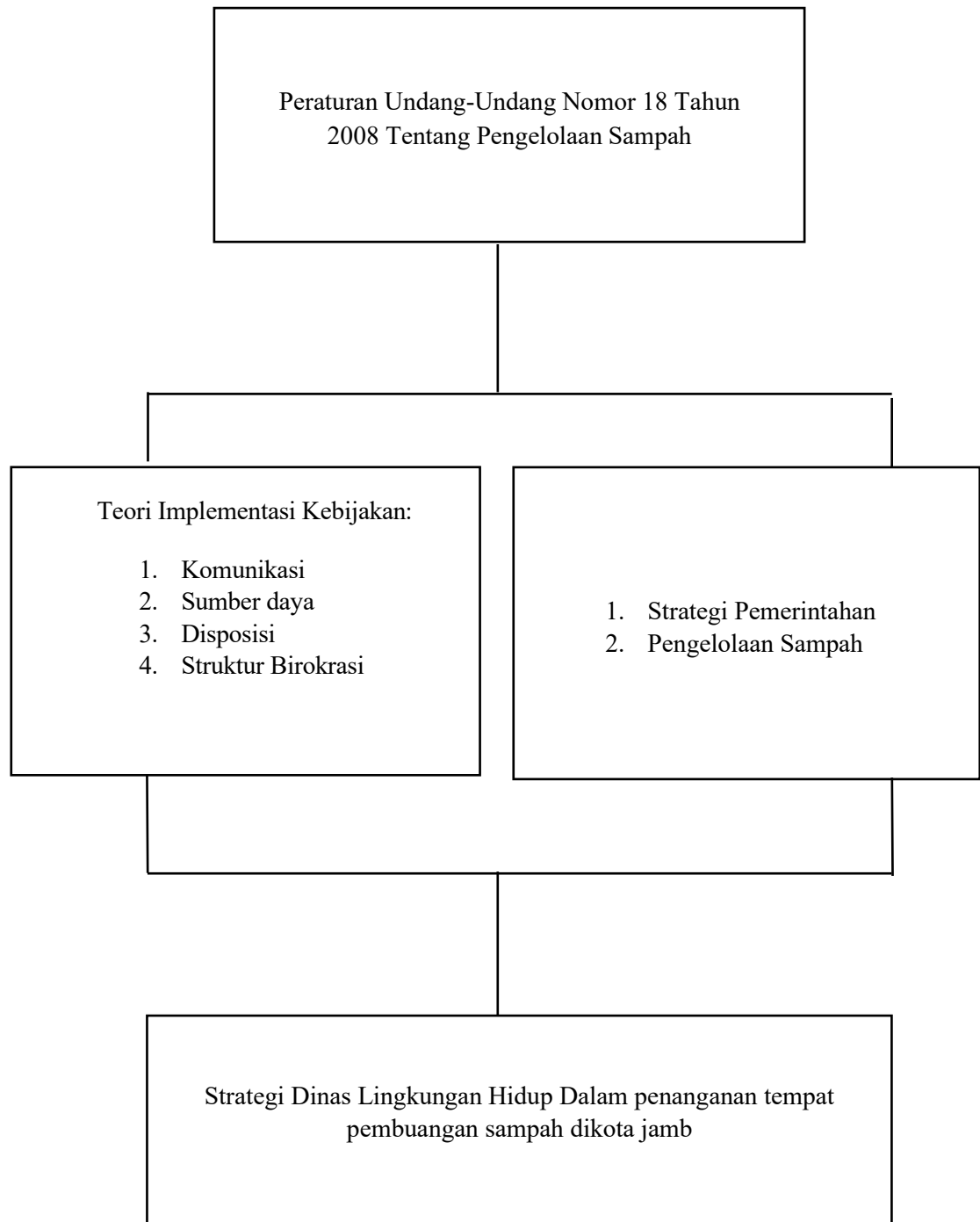
Pengertian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan sistem terpadu yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan secara sinergis antara semua pihak yang terlibat, mulai dari rumah tangga sebagai penghasil sampah, pemerintah sebagai pengelola, hingga industri daur ulang sebagai pemanfaat akhir.

³⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK, hlm. 45.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pembuangan, melainkan juga menyangkut nilai sosial, ekonomi, hukum, serta perilaku masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi elemen penting dalam menciptakan kota yang sehat, produktif, dan berdaya tahan lingkungan.³⁶

³⁶ Tchobanoglous, George, Hilary Theisen, dan Samuel A. Vigil. *Manajemen Sampah Padat Terpadu: Prinsip-Prinsip Teknik dan Isu-isu Manajemen*. New York: McGraw-Hill, 1993.

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam kasus ini, penelitian kualitatif dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan, efektivitas strategi pengelolaan sampah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah dan dinamika yang terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Menurut Erickson 1968 menyatakan penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka³⁷. Sedangkan menurut Denzin & Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen³⁸.

³⁷ 10Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)hlm.7

³⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)hlm.5

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dimana terdapat proses memahami fenomena yang terjadi melalui berbagai metode ilmiah dan disimpulkan dengan bentuk deskripsi berupa kata-kata. menurut Moleong tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman secara mendalam³⁹.

Menurut Sugiyono ciri-ciri metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan masyarakat di sekitar Kelurahan Bagan Pete. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. sebagai unit analisis dalam penelitian ini khususnya pada strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi.

Wilayah ini dipilih karena merupakan fokus penelitian dan tempat di mana masalah yang diteliti terjadi secara nyata. Dengan memilih lokasi penelitian yang spesifik, peneliti dapat lebih mendalam dalam memahami konteks lokal, dinamika sosial, dan permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian di lokasi yang relevan juga memungkinkan peneliti untuk bekerja sama dengan pihak terkait,

³⁹ Moleong, Op. Cit, hlm. 4

seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan memperoleh data yang diperlukan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Serta dampak solusi dari pengelolaan penanganan tempat pembuangan sampah di kelurahan bagan pete kota jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer yaitu dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengobservasi dan wawancara selama kegiatan penelitian berlangsung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan literatur seperti buku, jurnal, media online, penelitian terdahulu, dokumen grafis (tabel, catatan, rapat, notulen, dll) foto-foto, rekaman video atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dalam penentuan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan dianggap mempunyai

informasi serta data-data yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam hal ini peneliti memilih informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan guna memperoleh data yang akurat. Maka dalam peneliti menetapkan informan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Bapak Firman Ariyanto (Kasi Lingkungan Hidup Kota Jambi)
2. Bapak Faisal Iskandar (Lurah Bagan Pete Kota Jambi)
3. Bapak Toni (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
4. Ibu Neli (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
5. Ibu Neneng (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)
6. Ibu Eni (Masyarakat Kelurahan Bagan Pete)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, untuk itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti⁴⁰. Menurut Marshall melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut⁴¹. Artinya bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 52

⁴¹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.106

tempat dilakukannya penelitian.

- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selanjutnya adalah teknik wawancara. Wawancara menurut Bogdan dan Biklen ialah percakapan yang memiliki tujuan, biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih yang diajukan oleh salah seorang dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan⁴². Menurut Susan Stainback dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi⁴³. Jadi, dapat disimpulkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan baik yang telah disusun maupun secara langsung kepada seorang untuk dimintai informasi terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian, dokumen digunakan sebagai alat pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa gambar-gambar kegiatan operasional dan lokasi pada Kelurahan Bagan Pete. Selain berupa gambar, dokumentasi lain yang didapatkan penelitian berupa tulisan dan data-data pendukung.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode

⁴² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Citapusaka Media, 2012) hlm 119

⁴³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 114

penelitian ilmiah, sebab melalui analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah penelitian⁴⁴. Tahap analisis ini sangat menentukan, karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang kebenaran-kebenaran yang dapat dipahami untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dengan kata lain data yang dikumpulkan dan digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus untuk menyarankan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam mencapai tujuan. Analisis data ini digunakan untuk menggambarkan Strategi dinas lingkungan hidup dalam penanganan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Data-data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara maupun dokumentasi sebelum digunakan/ditampilkan telah diproses melalui pencatatan, pengelompokkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan, sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan. Model analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang

⁴⁴ Nazir, moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 405

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang tadinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilih untuk mendapatkan focus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang mendalam.

3. Conclusion Drawing/Verificatin (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peneliti kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam penegertian lain- lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas.

Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen analisis data yaitu

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁴⁵.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin ada empat macam yang membedakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori⁴⁶

⁴⁵ Alfi Haris Wanto. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*. *Jurnal of Publik Sector innovations*, Vol. 2, No. (1), hlm. 42

⁴⁶ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo)